

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang membahas beberapa poin penting yakni latar belakang penulisan, rumusan masalah, metode, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang alasan dan tujuan yang ingin dicapai dari keseluruhan tulisan ini.

1.1. Latar Belakang Penulisan

Pluralitas agama merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam sejarah peradaban manusia. Sejak zaman kuno, manusia telah menganut berbagai sistem kepercayaan yang menandakan pemahaman mereka tentang eksistensi, moralitas dan hubungan dengan yang transenden. Pluralitas itu tidak hanya menciptakan dinamika sosial yang kompleks, tetapi juga mendorong interaksi yang membentuk peradaban. Secara historis, pluralitas agama terjadi ketika adanya perjumpaan antara agama-agama pribumi (sistem kepercayaan tradisional) dengan agama-agama yang datang dari luar. Agama-agama pribumi merupakan sistem kepercayaan yang eksis dan dihidupi oleh suatu kelompok dan budaya tertentu jauh sebelum agama-agama dari luar tiba. Sebaliknya, agama yang berasal dari luar adalah agama yang berkembang melalui evangelisasi atau penyebaran oleh orang atau penganut agama tertentu. Agama-agama tersebut diyakini, dirasakan, dialami dan dihidupi secara intensif oleh manusia sepanjang sejarah peradaban. Tidak jarang pula bahwa agama-agama tersebut menjadi ideologi yang mempengaruhi cara pandang penganutnya akan dunia dan sesama.¹

Pluralitas agama mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Kehadiran agama-agama turut berkontribusi bagi tatanan hidup bersama melalui nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut menjadi kompas moral yang menuntun dan mengarahkan manusia dalam menentukan dan membangun hidupnya. Agama menjadi motor penggerak bagi manusia untuk

¹ Am Hardjana, *Penghayatan Agama: yang Otentik dan tidak Autentik* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 9.

mencari dan menemukan makna hidupnya. Meskipun demikian, hubungan antaragama mengalami pasang surut. Keberadaan agama-agama menimbulkan efek ganda. Di satu sisi agama menjadi kekuatan yang dapat mempererat kohesi sosial dan menjadi sumber moralitas bagi manusia untuk hidup lebih beradab. Di sisi lain agama justru menjadi dalang di balik berbagai konflik sosial. Agama turut serta dalam menciptakan ketidakharmonisan dalam hidup bersama; menyebabkan disintegrasi sosial; menjadi sumber dan penyulut konflik sosial. Keberagaman agama kerap kali menimbulkan implikasi sosial yang kompleks, yang kemudian bermuara pada konflik antaragama. Hal itu memang sesuatu yang tidak terbantahkan, sebab perbedaan-perbedaan seringkali memantik umat beragama untuk berjuang dan bersaing satu sama lain yang menandakan sikap dominasi di tengah kelompok-kelompok agama lain.²

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang penduduknya sangat majemuk. Indonesia terbentuk dengan beraneka ragam agama, suku, ras, bahasa dan budaya. Hal itu menunjukkan negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang multireligius. Pluralitas agama sesungguhnya menunjukkan kekayaan dan kekhasan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa yang lain. Konstitusi dan UUD 1945 mengakui dan melegitimasi enam agama besar yakni: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai sistem kepercayaan tradisional yang masih dianut oleh sejumlah suku di Nusantara, seperti Marapu di Sumba, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan Kaharingan di Kalimantan. Sistem-sistem kepercayaan tradisional ini telah lama dihidupi oleh penduduk setempat dan menjadi kompas moral mereka dalam hidup bersama. Agama-agama tersebut juga menjadi norma yang mengatur kehidupan bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Setiap agama baik yang modern maupun tradisional mempunyai doktrin dan ritual yang khas dan unik, yang menjadi faktor pembeda di antara agama yang berbeda.³

² James A. Beckford, "Re-Thinking Religious Pluralism", dalam buku Giuseppe Giordan dan Enzo Pace (eds.), *Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the Contemporary World* (Jakarta: Springer, 2014), hlm. 21.

³ Anna M. Gada, "Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account. By Andrew Beatty. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology, no. 111. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999. xv, 272 pp. 64.95,(cloth)." *The Journal of Asian Studies* 60.1 (2001), hlm. 288-289.

Pluralitas agama telah menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memilih dan memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing. Kebebasan beragama diakui sebagai hak fundamental yang tidak boleh dipaksa atau ditanggihkan dengan alasan apa pun. Hak tersebut harus dilindungi dan dijamin keberadaannya. Hukum-hukum internasional maupun nasional pun mengkondisikan penjaminan dan perlindungan hak fundamental tersebut. Instrumen-instrumen HAM internasional maupun nasional melegitimasi dan menjamin setiap orang untuk beragama seturut keyakinannya sendiri. Setiap orang berhak mengekspresikan agama atau keyakinannya melalui ibadah, ritus, dan pengajaran keagamaan seturut tata aturan agama yang dianutnya. Tidak seorangpun yang boleh mengalami tekanan dan paksaan yang dapat mengganggu kebebasannya untuk memilih dan memeluk suatu agama. Kebebasan tersebut hanya boleh dibatasi oleh hukum, dan hanya jika dibutuhkan untuk memproteksi keselamatan dan ketertiban umum, moralitas dan hak, serta kebebasan orang lain.⁴

Pancasila sebagai dasar negara telah secara gamblang memayungi dan mengayomi setiap perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi. Cita-cita atau falsafah negara Indonesia adalah persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. *Bhineka Tunggal Ika* menyiratkan bahwa toleransi dan moderasi merupakan salah satu pilar penyanggah kehidupan bersama bangsa Indonesia. Pancasila dan *Bhineka Tunggal Ika* telah secara tegas mengkondisikan politik negara yang inklusif untuk seluruh anasir pembentukan negara-bangsa dalam satuan yang minoritas ataupun mayoritas. Hal itu berarti bahwa baik mayoritas maupun minoritas mempunyai porsi kebebasan yang sama. Tidak boleh ada yang menghegemoni atau menganggap paling superior atas yang lain. Kelompok mayoritas tidak boleh mendominasi dan menghegemoni yang minoritas, tetapi harus saling merangkul dan reseptif satu terhadap yang lain. Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara telah memberi ruang serentak memproteksi setiap warga negara untuk memilih dan memeluk agama seturut keyakinan mereka masing-masing.⁵

⁴ Robert Mirsel, "Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ledalero* 21:1 (Mauwere: Juni 2022) hlm. 54-55.

⁵ Halili dkk., *Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2018), hlm. 4-7.

Agama telah memainkan peran fundamental dalam membentuk dan menuntun perjalanan kehidupan bangsa Indonesia baik dalam aspek moral, sosial, budaya, politik maupun pembangunan sosial. Agama memainkan perannya sebagai basis moral dalam mengkonstruksi peradaban hidup masyarakat Indonesia. Agama-agama mempunyai peran dalam membentuk karakter dan cara pandang para pemeluknya untuk bersikap benar, beradab dan bertanggung jawab baik terhadap negara; terhadap sesama yang lain; terhadap alam semesta maupun terhadap Tuhan yang dialaminya. Sebagai kekuatan moral dan etika, agama memiliki kaidah-kaidah yang berfungsi memberikan tuntunan dan pedoman hidup dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Agama tidak hanya menjadi pedoman spiritual bagi pemeluknya tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial, membangun karakter bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Agama menjadi basis moral dan etika bagi setiap pemeluknya dalam berjuang mencapai tujuan hidup bersama.⁶

Satu hal yang tidak terbantahkan bahwa pluralitas agama di Indonesia masih menjadi momok yang menakutkan, karena menyebabkan berbagai konflik sosial. Dalam tataran konstitusional, negara Indonesia mengkondisikan dan menjamin kebebasan beragama setiap warganya. Namun, dalam prakteknya tantangan terhadap kebebasan beragama sering kali muncul dalam bentuk intoleransi, diskriminasi dan kekerasan berbasiskan agama. Perbedaan agama seringkali menjadi sumber ketegangan, terutama ketika adanya benturan nilai di antara kelompok agama yang berbeda. Hal itu mencerminkan bahwa agama sebagai basis spiritual, moral dan etika belum diaktualisasikan secara bertanggung jawab. Agama yang telah diyakini sebagai kekuatan utama kohesi sosial; sebagai aspirasi manusia yang paling sublim; sebagai perekat tatanan kehidupan bermasyarakat dan perdamaian batin individu; sebagai sesuatu yang memuliakan dan membuat manusia beradab justru telah menjadi sumber dan penyulut konflik, mempertinggi fanatisme dan toleransi beragama.⁷

⁶ H. M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 81.

⁷ Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1966), hlm. 2.

Pluralitas agama seringkali memicu krisis toleransi dalam beragama. Perbedaan agama seringkali dibarengi dengan berbagai benturan, konflik, kekerasan, permusuhan, bahkan perang yang berbasis sentimen keagamaan. Isu agama seringkali menjadi sumber dan pemicu terjadinya saling membunuh antarumat beragama di Indonesia. Hal itu nyata dalam kasus kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pada 13-14 Mei 1998, konflik etnis Dayak-Madura di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1999, Maluku pada tahun 2000-2001, darurat sipil di Aceh, dan konflik Muslim-Kristen di Poso sejak Desember 1998. Kasus-kasus tersebut memverifikasi kekuatan destruktif dari keberagaman agama di Indonesia.⁸ Hingga saat ini masalah dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama masih terus menghantui kehidupan masyarakat Indonesia. Ada banyak data dan laporan kasus yang memverifikasi bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum terwujud seutuhnya. Berbagai diskriminasi, intoleransi dan konflik berbasiskan agama masih terus terjadi, bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang dirilis oleh Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menunjukkan bahwa kondisi kebebasan beragama di Indonesia sepanjang tahun 2023 menuai banyak persoalan. Sepanjang tahun 2023 ada beberapa peristiwa pelarangan pendirian rumah ibadah, seperti penolakan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Malang, Jawa Timur (Maret 2023); penutupan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Purwakarta, Jawa Barat (April 2023); penutupan Gereja Kristen Jawa di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah (Juni 2023); penolakan pembangunan Vihara di Cimacan, Cianjur, Jawa Barat (Agustus 2023); dan penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, Aceh Darussalam (September 2023).⁹

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa iklim toleransi beragama di Indonesia masih rapuh. Kebebasan beragama yang telah dijamin oleh UUD dan dasar negara hanyalah isapan jempol semata. Agama yang sejatinya menjadi sumber kasih, kini berubah haluan menjadi penyebab konflik di antara warga. Maka

⁸ Alamsyah M. Djafar, *"Intoleransi-Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama"* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 175.

⁹ Sekretariat Bersama Koalisi Advokasi KBB Indonesia, "Catatan dan Refleksi Akhir Tahun: Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2023", dalam *Catatan-Akhir-Tahun-2023 Situasi-KBBi Sekber-KBB Ver1-1.pdf*, diakses pada 02 Agustus 2024.

dari itu, upaya untuk menyuburkan sikap toleransi; menjaga dan merawat kerukunan beragama; menjamin dan melindungi kebebasan beragama adalah sebuah keniscayaan. Hal itu menjadi tanggung jawab semua agama dalam sinerginya dengan pemerintah dan berbagai pihak, demi terwujudnya toleransi beragama yang otentik di Indonesia. Dalam konteks ini, dialog antaragama menjadi salah satu tindakan yang sangat urgen dalam menciptakan kerukunan; mengatasi konflik dan memupuk toleransi lintas agama. Dialog antaragama menjadi suatu kebutuhan esensial untuk menciptakan hubungan yang lebih damai dan inklusif dalam masyarakat yang pluralistik. Dialog antaragama menjadi alternatif strategis dalam upaya mencegah dan mengatasi konflik antaragama. Dialog antaragama yang diupayakan terus-menerus dapat menciptakan pemahaman dan pengertian antarumat beragama, sehingga berbagai prasangka dan stereotip dapat diminimalisir.¹⁰

Dialog antaragama memang bukan fenomena baru dalam kehidupan beragama. Dalam sejarah misalnya, pertemuan antara St. Fransiskus dari Asisi dan Sultan Malik al-Kamil di tengah membaranya hubungan Islam-Katolik dalam Perang Salib Kelima pada tahun 1219 adalah salah satu contoh awal toleransi dan dialog antaragama.¹¹ Selain itu, Konsili Vatikan II pada tahun 1965 melalui dekrit *Nostra Aetate* juga menunjukkan suatu sikap toleransi dan dialogis dari Gereja Katolik dengan mengubah sikap dan pandangannya terhadap agama-agama lain dan menegaskan pentingnya kerja sama lintas agama untuk mencapai perdamaian dunia.¹² Demikian pula dalam tradisi Hindu dan Budha dengan prinsip *ahimsa* (tanpa kekerasan) telah menjadi landasan interaksi damai dengan agama lain sepanjang sejarah. Itu berarti bahwa dialog antaragama mempunyai peranan penting dalam membangun keharmonisan dan perdamaian antaragama. Dialog

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudhiarsa dan Raymundus I. Made, ‘‘Santo dan Sultan. Kisah Tersembunyi Tentang Juru Damai Perang Salib.: Santo dan Sultan. Kisah Tersembunyi Tentang Juru Damai Perang Salib’’ *Jurnal Perspektif* 14:1 (Januari,2019), hlm. 97-101.

¹² J. Bakker, S. J, *Piagam Nostra Aetate: Tafsiran Zaman Kita Zaman Dialog Antar Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1972), hlm. 20.

antaragama menjadi langkah strategis dalam mempererat persaudaraan dan kerja sama lintas agama.¹³

Urgensi dialog antaragama menjadi perhatian khusus pemerintah dan berbagai lembaga sosial keagamaan di Indonesia selama ini. Meskipun hasilnya belum efektif, tetapi sejak era reformasi, dialog antaragama menjadi isu penting dalam menjaga kerukunan sosial di tengah perbedaan agama dan keyakinan. Hal itu terwujud dalam bentuk legitimasi atas lembaga-lembaga yang menjadi forum bagi tokoh dan umat beragama untuk berinteraksi dan berdialog. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) kerap mengadakan diskusi dan seminar untuk mengatasi konflik dan memfasilitasi kerja sama lintas agama. Selain itu, lembaga-lembaga masyarakat sipil juga aktif berperan dalam dialog antaragama, seperti Wahid Foundation dan Maarif Institute yang terus mengupayakan program-program peningkatan pemahaman lintas agama untuk masyarakat luas. Lembaga-lembaga tersebut aktif dalam mempromosikan toleransi dan kerja sama antarumat beragama.¹⁴

Meskipun dialog antaragama telah lama menjadi bagian dari sejarah Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi. Ada berbagai tindakan dan perspektif keagamaan, serta regulasi yang menutup pintu bagi terwujudnya dialog antaragama yang efektif dan inklusif di Indonesia. Dinamika sosial-politik, intoleransi, dan politisasi agama sering kali menjadi penghalang terwujudnya dialog antaragama yang inklusif. Selain itu, dialog antaragama selama ini sering bersifat elitis, tidak melibatkan masyarakat akar rumput secara aktif. Konsekuensinya adalah masyarakat akar rumput tidak mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang doktrin agamanya dan agama orang lain sehingga mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang intoleran dan radikal. Tantangan lainnya adalah perbedaan interpretasi dalam ajaran agama. Kebhinekaan

¹³ Julius Lipner, *Hindus: Their Religious Beliefs and Practices* (London: Routledge, 2009), hlm. 125-130.

¹⁴ Barton, Greg. *Indonesia's struggle: Jemaah Islamiyah and the soul of Islam*, (UNSW Press, 2004), hlm. 34.

interpretasi sering kali menimbulkan ketegangan di antara umat beragama. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini dapat memperkeruh hubungan antaragama dan menjadi hambatan dalam dialog, terutama ketika suatu kelompok merasa paling benar dan memiliki otoritas moral yang lebih tinggi dari yang lain. Sikap tersebut cenderung menutup diri dengan keyakinan bahwa di luar agamanya tidak ada kebenaran atau kafir, karena itu harus dieliminasi.¹⁵

Urgensi dialog antaragama telah menjadi perhatian khusus Gereja Katolik. Hal itu telah dimulai oleh St. Fransiskus Asisi yang pergi menemui Sultan Malik al-Kamil 800-an yang silam untuk berdialog. Upaya itu diperkuat lagi pada Konsili Vatikan II, tepatnya ketika Gereja Katolik membuka diri terhadap kehadiran agama-agama lain. Gereja Katolik mengubah sikap dan pandangannya terhadap agama-agama lain dan mendorong setiap umat beragama untuk berdialog dan menjalin kerja sama dengan agama-agama lain. Hal itu secara eksplisit tertuang dalam dekret *Nostra Aetate*. Hal itu semakin diintensifkan oleh Paus Fransiskus, ketika bertemu dengan para pemimpin agama dan negara untuk berdialog. Perjumpaannya dengan “yang lain” dan kecintaannya terhadap dialog antaragama telah ia bakukan dalam ensiklik *Fratelli Tutti*. *Fratelli Tutti* menawarkan perspektif baru untuk menginterpretasi dan mengembangkan dialog antaragama. Ensiklik ini menekankan prinsip persaudaraan universal (*universal fraternity*) dan persahabatan sosial (*social frienship*) yang dapat menjadi kerangka konseptual dalam memperkuat dialog antaragama di Indonesia. Gagasan dan prinsip-prinsip dialog antaragama dalam ensiklik *Fratelli Tutti* dapat dijadikan sebagai basis dalam memperkuat dialog antaragama di Indonesia.¹⁶

Paus Fransiskus melalui *Fratelli Tutti* mendefinisikan dialog antaragama sebagai jalan menuju perdamaian dan persaudaraan universal. Ia mengatakan bahwa dialog antaragama tidak hanya bertujuan untuk saling memahami, tetapi juga untuk mempererat kerja sama antaragama dalam menciptakan keadilan sosial dan menjaga perdamaian. Karena itu, Paus Fransiskus mengajak seluruh umat manusia

¹⁵ Setara Institute, *Kebebasan Beragama.*, bdk. Kebebasan Beragama | Setara Institute (setara-institute.org), diakses pada 02 Oktober 2024.

¹⁶ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, art. 2 penerj. R. Hardawiryana, SJ, cetakan XIV (Jakarta: Obor, 2019), hlm. 309-310.

untuk mengupayakan kerja sama lintas agama untuk menanggapi berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, eksploitasi manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kerja sama ini harus melampaui sekat-sekat budaya, agama maupun suku-bangsa, agar proses kerja sama tidak dilihat sebagai tindakan proselitisme. Selain itu, Paus Fransiskus juga mengajak semua umat beragama akan pentingnya dialog yang mendalam dan inklusif untuk merobohkan tembok kebencian, stereotip dan eksklusivisme sikap dan pandangan keagamaan. Melalui dialog, semua orang dihantar kepada pengenalan dan pemahaman yang otentik atas doktrin masing-masing agama, sehingga terwujudnya iklim toleransi yang otentik.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dialog antaragama dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti* dan urgensinya bagi kehidupan beragama di Indonesia. Karena itu, penulis memilih judul **“Urgensi Dialog Antaragama di Indonesia dalam Perspektif Ensiklik *Fratelli Tutti*”**. Ensiklik *Fratelli Tutti* menawarkan panduan etis dan praktis yang relevan dalam menghadapi tantangan dan peluang dialog antaragama di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip persaudaraan universal, solidaritas, cinta kasih dan budaya perjumpaan, ensiklik ini memberikan dasar yang kuat untuk memperkuat dan meningkatkan dialog antaragama di Indonesia, sehingga terciptanya masyarakat yang harmonis, rukun dan damai.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah utama yang hendak dijawab dalam tesis ini adalah: “Bagaimana Urgensi dialog antaragama menurut perspektif *Fratelli Tutti* bagi kehidupan beragama di Indonesia?” Dari rumusan utama tersebut terdapat beberapa rumusan khusus yakni bagaimana realitas dan dinamika dialog antaragama di Indonesia? Bagaimana konsep dialog antaragama dalam ensiklik *Fratelli Tutti*?

¹⁷ Ahmad Zainul Hamdi dan Mutafi, (ed.). *Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antar Iman* (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 15.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari tulisan ini adalah, *Pertama*, menjelaskan realitas dan dinamika dialog antaragama di Indonesia, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. *Kedua*, Menjelaskan konsep dialog antaragama dalam ensiklik *Fratelli Tutti*, terutama dalam kaitannya dengan persaudaraan universal dan persahabatan sosial. *Ketiga*, Menjelaskan urgensi ajaran tersebut bagi kehidupan antarumat beragama di Indonesia. Pada umumnya tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi dialog antaragama di Indonesia dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti*.

1.4. Manfaat Penulisan

Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang dialog antaragama dengan berbasiskan pada perspektif ensiklik *Fratelli Tutti*. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian teologi sosial dan multikulturalisme di Indonesia. Sedangkan manfaat praktisnya adalah agar umat beragama, tokoh agama, para pengambil kebijakan dan setiap orang yang membaca tulisan ini, sadar dan tergugah hatinya untuk selalu mengupayakan dialog dengan umat beragama lain, khususnya dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti*.

1.5. Metode Penulisan

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen. Sumber utama penelitian ini adalah ensiklik *Fratelli Tutti*, dokumen-dokumen Gereja Katolik lainnya yang paralel dengan dialog antaragama, serta literatur sekunder perihal kebebasan beragama di Indonesia. Studi ini juga mengkaji dokumen dan berbagai literatur yang secara khusus membahas dialog antaragama. Selain itu, dokumen hukum seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dikaji sebagai dasar legal dalam membahas kebebasan beragama di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disistematisasikan ke dalam lima bab dengan perinciannya sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang membahas latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Dialog Antargama menurut Ensiklik *Fratelli Tutti*. Bab ini menjelaskan latar belakang dan isi ringkasan dari ensiklik *Fratelli Tutti*, khususnya dalam kaitannya dengan dialog antaragama. Selain itu, bab ini juga membahas konsep dan prinsip-prinsip dialog antaragama dalam ensiklik *Fratelli Tutti*.

Bab III Dinamika dialog antaragama di Indonesia yang membahas tentang hakikat dan konsep dialog antaragama, serta jejak historis dialog antaragama di Indonesia. Selain itu, bab ini juga membahas faktor pendukung dan penghambat terwujudnya dialog antaragama yang efektif di Indonesia.

Bab IV Urgensi dialog antaragama dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti* bagi kehidupan beragama di Indonesia. Pokok-pokok bahasan dalam bab ini adalah dinamika kehidupan beragama di Indonesia, Ensiklik *Fratelli Tutti* dalam konteks dialog antaragama di Indonesia, prinsip-prinsip dialog antaragama dalam ensiklik *Fratelli Tutti* dan urgensi dialog antaragama bagi kehidupan beragama di Indonesia. Selain itu, bab ini juga membahas langkah konkret dari dialog antaragama di Indonesia.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan konklusi dari seluruh pembahasan tulisan ini. Selain itu, bab ini juga memuat usul dan saran.